

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519); 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 75); 12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Atasan PPID 2. PPID 3. PPID Pelaksana 4. Tim Pertimbangan	1. Lembar kerja/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Program Kerja 2. Komputer/printer/scanner 3. Peraturan 4. Alat Tulis Kantor 5. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila pemohon informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai ketentuan maka pemohon Informasi akan mengajukan Keberatan atau Sengketa Informasi ke Badan Publik bersangkutan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>



FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Atasan PPID	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID Pelaksana mengajukan usulan DIK ke PPID			Start	DIK PPID Pelaksana	5 hari kerja	Daftar DIK PPID Pelaksana	Draft usulan DIK oleh PPID Pelaksana
2.	PPID melaksanakan rapat Uji Konsekuensi				- Daftar DIK - Undangan Rapat - Dokumentasi	1 hari kerja	Draft Lembar Pengujian	Rapat bersama Tim Pertimbangan dan PPID Pelaksana untuk penyusunan Lembar Pengujian
3.	Mengajukan lembar pengujian ke atasan PPID				- Nota Dinas - Notulen Rapat	60 Menit	SK DIK	Jika atasan PPID belum menyetujui maka akan meminta penjelasan ke PPID.
4.	Publikasi DIK yang sudah ditandatangani atasan PPID pada website oleh PPID dan PPID pelaksana			End	- Komputer - Internet - Website - SK	60 Menit	Publikasi/Web	

